



2025

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III

Tahun 2025

**Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan
Yogyakarta**



BPP
MHKP

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta (LKj Stasiun KIPM Yogyakarta) Triwulan III Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Stasiun KIPM Yogyakarta dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

LKj ini disusun dengan mengacu pada Target Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan III Tahun 2025 dan juga dengan memperhatikan Renstra 2020-2024, Renja 2025 serta Manual IKU 2025. Dalam setiap indikator terdapat penjelasan terkait definisi dan juga penjelasan untuk masing-masing capaiannya. Karena LKJ ini merupakan LKJ Triwulan III Tahun 2025 sehingga data capaian merupakan data triwulan III pada tahun anggaran 2025

Kami menyadari bahwa di dalam LKj ini sangat mungkin terdapat sejumlah kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun untuk penyempurnaan di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Semoga LKj Stasiun KIPM Yogyakarta ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua.

Yogyakarta, 3 Oktober 2025
Plt. Kepala Stasiun KIPM Yogyakarta



Maria Tresia Sundah

Intisari Laporan Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan III Tahun 2025 menyajikan capaian sasaran strategis Stasiun KIPM Yogyakarta pada periode Triwulan III Tahun 2025 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Terhadap capaian tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulanan, tahunan dan juga target Renstra 2025-2029 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja BPPMHKP Yogyakarta Triwulan III Tahun 2025 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

- *Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan III Tahun 2025 adalah 114,43%*
- *NPSS Stasiun KIPM Yogyakarta masuk dalam kategori istimewa.*
- *Seluruh capaian IKU dan IK pada periode Triwulan III Tahun 2025 telah tercapai sesuai dan melebihi target Triwulan III yang ditentukan.*
- *Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta pada triwulan III tahun 2025 mencapai Rp 2.725.926.036 atau sebesar 56,71% dari pagu Rp 4.806.654.000.*

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Pada tahun 2023 BKIPM mengalami transformasi kelembagaan dimana fungsi karantina ikan beralih ke Badan Karantina Indonesia sesuai perpres no 45 tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu ke Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) sesuai Perpres 38 tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Stasiun KIPM Yogyakarta merupakan salah satu UPT BPPMHKP-Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di Kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj Interim) maupun tahunan (LKj

kesimpulan yang dapat menjadi bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja triwulan berikutnya.

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Regulasi yang berlaku terkait UPT lingkup BPPMHKP adalah Permen KP Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) yang secara umum hanya mengubah struktur organisasi UPT KIPM dari yang sebelumnya memiliki struktural Eselon II (Kepala Balai Besar), Eselon III (Kepala Balai/Kepala Bidang/Kepala Bagian), Eselon IV (Kepala Stasiun, Kepala Seksi/Kepala Subbagian) dan Eselon V (Kepala Urusan) menjadi hanya memiliki Eselon II (Kepala Balai Besar), Eselon IV (Kepala Subbagian), dan Eselon V (Kepala Urusan). Perubahan struktur tersebut didukung dengan keluarnya PERMENKP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka BPPMHKP memiliki kedudukan menyebutkan sebagai :

1. BPPMHKP merupakan bagian organisasi di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. BPPMHKP berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan
3. Tugas khusus BPPMHKP adalah dibidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dengan harapan kedepan berfungsi sebagai pengendalian kualitas, pengujian, inspeksi, dan sertifikat hasil kelautan dan perikanan.

Berdasarkan pada perubahan nomenklatur dan pembagian tugas dan fungsi organisasi selanjutnya pada Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia diterbitkan, maka fungsi pencegahan hama dan penyakit ikan karantina beserta pelaksanaannya beralih ke UPT Badan Karantina Indonesia, sehingga berdasarkan regulasi perubahan sistematika organisasi maka Pelayanan Operasional lingkup BPPMHKP berfungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
2. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
3. Pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
4. Pelaksanaan administrasi BPPMHKP

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Selanjutnya terkait dengan UPT Balai Uji Standar melaksanakan fungsi-fungsi organisasi sebagai berikut:

- a. penyusunan, pemantauan, evaluasi rencana, program dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelayanan uji standar pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- b. pelaksanaan pengujian terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka uji standar mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. pengembangan teknik dan metode pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- d. pelaksanaan uji profisiensi;
- e. pelaksanaan rancangan standardisasi metode pengujian pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- f. penyiapan bahan informasi dan publikasi hasil pengujian laboratorium pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- g. pelaksanaan kerja sama teknis laboratorium nasional dan internasional;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium;
- i. pengumpulan dan pengolahan data;
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Perkembangan dan penguatan fungsi UPT Pelayanan Operasional dan UPT Balai Uji Standar pada penjelasan tersebut didukung dengan terbitnya Perpres Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya diturunkan dalam Permen KP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memunculkan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) sebagai unit Eselon I di lingkungan KKP yang bertugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Struktur organisasi BPPMHKP sudah mencerminkan bahwa tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang akan dijalankan UPT yang nanti bertanggung jawab kepada Kepala BPPMHKP dimana secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan, tidak hanya berfokus pada pengolahan ikan (sektor hilir) saja tapi juga pada hasil kelautan dan perikanan yang berasal dari budi daya dan perikanan tangkap (sektor hulu).

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup BPPMHKP akan menjadi perpanjangan tangan dari BPPMHKP dalam melaksanakan tugas pengendalian dan pengawasan

mutu hasil kelautan dan perikanan mulai dari sektor hulu (budi daya dan perikanan tangkap) sampai dengan sektor hilir (pengolahan ikan). Berdasarkan atas hal tersebut dilakukan restrukturisasi organisasi UPT dengan usulan terdiri atas :

1. Pembubaran 11 (sebelas) UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
2. Perubahan nomenklatur, perubahan kelas, dan penyempurnaan tugas dan fungsi 35 (tiga puluh lima) UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menjadi UPT Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
3. Perubahan nomenklatur dan penyempurnaan tugas dan fungsi Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menjadi Balai Besar Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi yang semakin luas dan mencakup 9 (sembilan) sertifikasi mutu hulu hilir dari yang sebelumnya hanya 2 (dua) sertifikasi di hilir, maka penataan organisasi UPT ini menjadi urgensi yang tidak bisa dihindari. Untuk UPT Pelayanan Operasional, memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas organisasi UPT dalam mengemban tugas dan fungsi yang semakin luas tersebut, maka opsi yang dipilih adalah adanya UPT BPPMHKP yang berkedudukan di provinsi dan membawahi wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian memperhatikan ruang lingkup tugas, rentang kendali dan ketersediaan sumberdaya organisasi serta hasil analisis perhitungan klasifikasi yang telah disusun, maka UPT yang akan dibentuk adalah UPT Layanan Operasional sebanyak 35 (tiga puluh lima) UPT yang terdiri dari 1 (satu) UPT dengan status eselonering II.B yang berlokasi di Jawa Timur dan 34 (tiga puluh empat) UPT dengan status eselonering III.A yang juga berlokasi di 34 Provinsi. Selain 35 UPT Pelayanan Operasional, BPPMHKP juga didukung oleh UPT Pelayanan Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu (Balai Besar Uji Standar PPMHKP) dengan status eselonering II.B.



Gambar 2. Kantor dan Wilayah Kerja BPPMHKP Yogyakarta

Setiap unsur di lingkup Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP dalam melaksanakan tugas harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP maupun dalam hubungan antar instansi baik pusat maupun daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tersebut, Stasiun KIPM Yogyakarta memiliki sumber daya manusia dengan total sebanyak 32 orang dengan rincian 17 ASN, 4 PPNPN dan 10 Outsourcing. ASN di Stasiun KIPM Yogyakarta terdiri dari 1 pejabat struktural, 11 pejabat fungsional tertentu dan 5 fungsional umum.

Tabel 1. Rincian SDM Stasiun KIPM Yogyakarta sebagai berikut

Rincian SDM Stasiun KIPM Yogyakarta	
Jabatan Fungsional Tertentu (11)	
-	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Muda (2)
-	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Pertama (1)
-	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir (3)
-	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia (1)
-	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil (1)
-	Pranata Keuangan APBN Penyelia (1)
-	Pranata SDM Mahir (1)
-	Penata Laksana Barang Terampil (1)
Jabatan Fungsional Umum (5),	
Analisis SDMA (1), Pengadministrasi Umum (1), Pengelola Data (1), Penyusun LK (1), Pengadministrasi Persuratan (1)	
PPNPN (4)	
Pramubakti Lab (3), Pramubakti IT (1),	
Outsourcing (10)	
Pengolah Data (1), Cleaning Service (2), Driver (1), Security (6)	

Susunan organisasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan terdiri atas:

- a. Urusan Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 3. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Yogyakarta berdasarkan Permen KP Nomor Tahun 2020

Urusan umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Untuk dapat mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang ada, Kepala UPT memerlukan personel dibawahnya yang dapat melakukan koordinasi kepada seluruh pegawai dalam pembagian ketugasan yaitu oleh Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dan Tim Kerja Dukungan Manajerial

Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

1.4. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian LKj Stasiun KIPM Yogyakarta sebagai berikut:

- I. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

- II. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- III. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- IV. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

Berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 193 (Perpres 193), Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) memiliki tugas untuk menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan. Selanjutnya didukung pada visi Presiden 2025-2029 mengusung komitmen "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", salah satu visi yaitu dengan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ekonomi biru merupakan konsep program ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesejahteraan Masyarakat, dan menjaga Kesehatan ekonomi laut.

Visi Stasiun KIPM Yogyakarta ditetapkan sesuai dengan Visi BPPMHKP yang selaras dengan visi KKP 2025-2029 dengan visi nasional dan kementerian, BPPMHKP merumuskan visinya sendiri untuk periode yang sama, yaitu dengan mengacu pada beberapa isu yang menjadi perhatian Presiden yang tertuang dalam Asta Cita, antara lain yang terkait dengan (1) meningkatkan gizi anak melalui makan bergizi gratis; (2) swasembada pangan menuju lumbung pangan dunia dan (3) hilirisasi komoditas.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama melaksanakan 7 (tujuh) dari 8 (delapan) misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Misi ke-2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki peran strategis dalam memperkuat kawasan sentra produksi pangan berbasis kelautan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Digitalisasi data pangan menjadi elemen kunci untuk efisiensi distribusi dan pengelolaan pangan. Selain itu, pengembangan pangan lokal berbasis laut seperti ikan dan rumput laut didukung biofortifikasi dan fortifikasi pangan untuk meningkatkan nilai gizi. Peningkatan produktivitas perikanan, pengembangan pelabuhan perikanan modern, dan armada tangkap di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menjadi prioritas utama. Pengembangan pangan akuatik juga mendukung ketahanan pangan lokal dan nasional, sejalan dengan prinsip keberlanjutan ekonomi biru.

2. Misi ke-3: Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur. Destinasi wisata berbasis laut seperti Bali, Kepri, dan Lombok perlu optimalisasi dalam pemanfaatannya sebagai pendorong peningkatan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan. Inovasi dalam pengolahan hasil laut perlu didorong dan evaluasi keberlanjutan untuk meningkatkan nilai tambah dan akses pasar bagi masyarakat pesisir.
3. Misi ke-4: Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Penyiapan tenaga kerja terampil melalui pendidikan vokasi relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, program makan bergizi berbasis ikan mendukung pengentasan stunting dan menciptakan generasi produktif.
4. Misi ke-5: Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Fokus pada pengolahan rumput laut menjadi produk bernilai tinggi seperti kosmetik, pangan olahan, dan bahan baku industri. Penguatan logistik dan distribusi menjadi kunci daya saing produk perikanan di pasar global (Susanto & Wibowo, 2021).
5. Misi ke-6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan. Usaha perikanan lokal seperti budidaya ikan dan pengolahan rumput laut menjadi pilar pemberdayaan ekonomi desa. Dengan akses ke pasar dan teknologi, masyarakat pedesaan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan secara inklusif.
6. Misi ke-7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba. Regulasi yang efisien dan transparan diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang baik di sektor kelautan, memastikan keberlanjutan sumber daya dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
7. Misi ke-8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Restorasi mangrove dan terumbu karang serta penguatan resiliensi masyarakat pesisir menjadi langkah mitigasi penting terhadap dampak perubahan iklim.

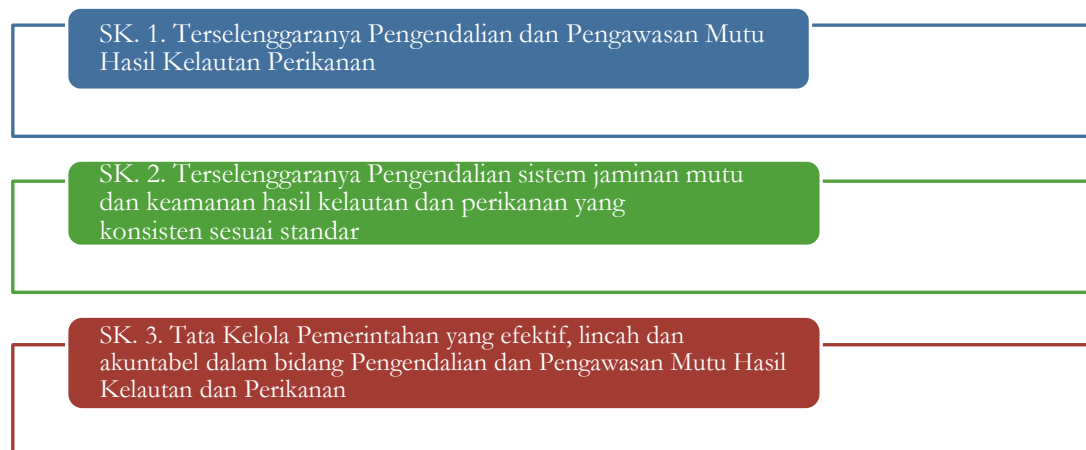
Peran Strategis BPPMHKP dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto 2025–2029 atau agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari RPJMN 2025–2029, Badan Pengendalian

dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) berperan secara strategis dalam memastikan kualitas, keamanan, dan daya saing hasil kelautan dan perikanan nasional.

2.2. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Stasiun KIPM Yogyakarta telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Rencana strategis tersebut dijabarkan ke dalam Peta Strategi Stasiun KIPM Yogyakarta (Gambar 2.1). Peta Strategi adalah suatu *dashboard* yang memetakan sasaran strategi organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi kemudian diturunkan menjadi sasaran kegiatan, berikut adalah sasaran kegiatan pada Stasiun KIPM Yogyakarta



Gambar 4. Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Yogyakarta Tahun 2025

Sasaran kegiatan Stasiun KIPM Yogyakarta tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam indikator dan target kinerja yang akan dicapai selama Tahun Anggaran 2025 baik dalam satu tahun sekaligus maupun setiap triwulannya. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan adalah suatu

bentuk keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah direncanakan. Indikator kinerja dari setiap sasaran strategis dan target kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta dapat dilihat pada tabel di bawah.

Pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Stasiun KIPM Yogyakarta, jumlah indikator kinerja kegiatan berjumlah 15 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Perjanjian Kinerja 2025 Stasiun KIPM Yogyakarta

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (lokasi)	2
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	75
		6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	71,5
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Indeks)	87
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	86
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	85

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	76
		14.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	70
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	88

Pencapaian Kinerja Organisasi dilihat dari Total Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dimana rentang nilainya adalah 0 – 120%. NPSS diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menghitung pencapaian seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

$$NPSS = \frac{\sum \% \text{Capaian IKU}}{\sum \text{IKU yg mempunyai target pada triwulan tersebut}}$$

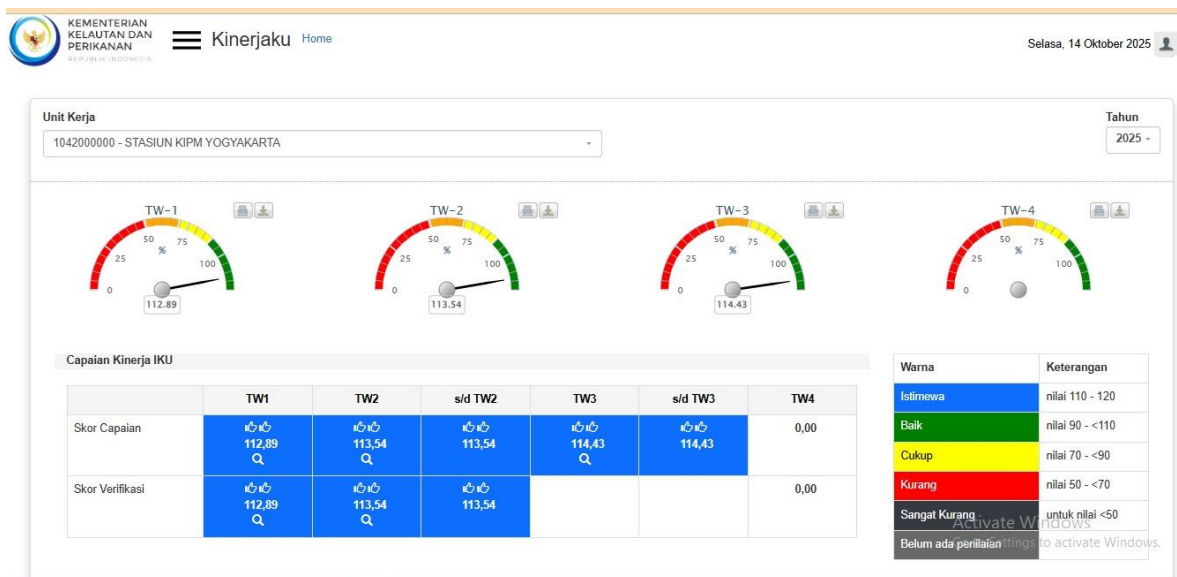
Adapun keterangan status NPSS pada aplikasi Kinerjaaku adalah sebagai berikut:

SANGAT BAIK	≥ 110 - 120 + IDE BARU
BAIK	≥ 90 - <120
CUKUP	≥ 70 - <90
KURANG	≥ 50 - <70
SANGAT KURANG	≤ 50
BELUM ADA PENILAIAN	
BELUM INPUT CAPAIAN	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Pada pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja menggunakan aplikasi database online www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun dan disepakati sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program.



Gambar 5. Hasil Pengukuran Kinerja pada aplikasi Kinerjaku KKP

Berdasarkan aplikasi Kinerjaku, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Yogyakarta pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu 114,43 dalam kriteria istimewa. Untuk memperoleh kriteria baik, NPSS minimal adalah $90 \leq$ 110 dan kriteria istimewa nilai 110 – 120.

Capaian Indikator Kinerja di masing-masing Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Yogyakarta pada Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 Capaian Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan III Tahun 2025



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

e-Kinerja Home

Selasa, 14 Oktober 2025

NKO September - 2025 Download

Unit Kerja : STASIUN KIPM YOGYAKARTA

Skor Kinerja : **114.43**

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✘, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung+

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target September	Capaian September	%	Target s/d September	Capaian s/d September	%	Tgl Input
S.01	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan						114,57			114,57		
IKS.1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) <small>Data Dukung1 ✓ </small> Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	70,00	82,10	117,29	70,00	82,10	117,29	12-Oct-2025 16:28
IKS.2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	70,00	100,00	120,00	70,00	100,00	120,00	12-Oct-2025 16:28
IKS.3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (lokasi) Tambah Data Dukung+	lokasi	Maximize	Akumulasi	2,00	1,00	100,00	120,00	2,00	101,00	120,00	12-Oct-2025 16:28
IKS.4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) <small>Data Dukung1 ✓ </small> Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	99,00	99,00	100,00	101,01	99,00	100,00	101,01	12-Oct-2025 16:28
S.02	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar											
IKS.02.1	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	0,00			0,00	0,00		12-Oct-2025 16:28
IKS.02.2	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	0,00			0,00	0,00		12-Oct-2025 16:28
S.03	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						114,28			114,28		
IKS.03.1	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,00	0,00			0,00	0,00		12-Oct-2025 16:28
IKS.03.2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,50	0,00			0,00	0,00		12-Oct-2025 16:28
IKS.03.3	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		12-Oct-2025 16:28
IKS.03.4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Indeks) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87,00	0,00			0,00	0,00		12-Oct-2025 16:28
IKS.03.5	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86,00	0,00			0,00	0,00		12-Oct-2025 16:28
IKS.03.6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Rata-rata	85,00	85,00	100,00	117,65	170,00	200,00	117,65	12-Oct-2025 16:28
IKS.03.7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) <small>Data Dukung1 ✓ </small> Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	76,00	76,00	100,00	120,00	76,00	100,00	120,00	12-Oct-2025 16:28
IKS.03.8	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	0,00			0,00	0,00		12-Oct-2025 16:28
IKS.03.9	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai) <small>Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 ✓ </small> Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,00	88,00	92,56	105,18	88,00	92,56	105,18	12-Oct-2025 16:28

Tutup

Tabel 3 Capaian Sasaran Kegiatan Triwulan III Tahun 2025

Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Targ et 2025	Triwulan III			% terhadap Target 2025	Renstra 2025-2029		Realisasi Tahun Sebelumnya	
				Target	Realisasi	%		Target 2025	% Capaian thd Target 2025	Reali sasi 2024	% Capaian thd Relalisasi 2024
SK 1. Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan											
IK1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	70	70	82,10	117,29	117,29	70	117,29	100	8,10
IK2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	70	70	100	120	120	70	120	86,36	115,7
IK3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (lokasi)	loka si	2	1	1	100	120	2 lokasi	120	6	16,6
IK4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	99	99	100	101,01	101,01	99	101,01	100	100
SK 2. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar											
IK5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	%	75	-	-	-	-	75	-	100	-
IK6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	%	75	-	-	-	-	75	-	100	-
SK3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan											
IK7	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta	Nilai	92	-	-	-	-	92	-	93,94	-
IK8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup	Nilai	71,50	-	-	-	-	71,50	-	92,50	-

Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Triwulan III			% terhadap Target 2025	Renstra 2025-2029		Realisasi Tahun Sebelumnya	
				Target	Realisasi	%		Target 2025	% Capaian thd Target 2025	Realisasi 2024	% Capaian thd Realisasi 2024
IK9	UPT Stasiun KIPM Yogyakarta Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	100	-	-	-	-	100	-	100	-
IK10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta	Indeks	87	-	-	-	-	87	-	90,35	-
IK11	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	Nilai	86	-	-	-	-	86	-	83,05	-
IK12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	85	85	100	117,65	117,65	85	117,65	100	100
IK13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	76	76	100	120	120	76	120	84,34	118,56
IK14	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	70	-	-	-	-	IKU Baru	-	IKU Baru	-
IK 15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	Nilai	88	88	92,56	105,18	105,18	88	105,18	97,44	94

*Maksimal realisasi adalah 120%

3.2. Analisis dan Evaluasi

Capaian kinerja berdasarkan sasaran kegiatan secara lebih detail menurut indikator kerjanya dijelaskan sebagai berikut (dengan perhitungan nilai posisi akhir)

Sasaran kegiatan 1.

Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

PP No 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, salah satunya mengatur persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berupa PB UMKU.

Pasal 13 dan 14, pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar. BPPMHKP melaksanakan penerbitan 9 sertifikat standar yang termasuk PB UMKU.

Layanan Sertifikasi BPPMHKP

Layanan Sertifikasi BPPMHKP

PP No 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, salah mengatur persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa PB UMKU. Pasal 13 dan 14, Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar. BPPMHKP melaksanakan penerbitan 9 sertifikat standar yang termasuk PB UMKU, yang terbagi menjadi:

Sertifikasi Produk Perikanan Primer			Sertifikasi Produk Perikanan Pascapanen	
1 CBIB Cara Budidaya Ikan yang Baik Acuan: SNI 8228.1:2015	2 CPIB Cara Pembenihan Ikan yang Baik Acuan: SNI 8035:2019	3 CPIB Kapal Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal Acuan: SNI 8087:2014	7 SKP Sertifikat Kelayakan Pengolahan Acuan: SNI CXC 1:1969 (Ditetapkan BSN tahun 2007) Permen KP No. 17 Tahun 2019	8 HACCP Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis Acuan: SNI CXC 1:1969 (Ditetapkan BSN tahun 2007)
4 CPPIB Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik Acuan: SNI masing-masing komoditas	5 CPOIB Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik Acuan: Perdirjen Perikanan Budidaya No. 187 tahun 2023	6 CDOIB Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik Acuan: Perdirjen Perikanan Budidaya No. 186 tahun 2023	9 SPDI Sertifikat Pengelolaan Distribusi Ikan Acuan: PP 27 Tahun 2021, Permen KP 58 Tahun 2021 dan PP 57 tahun 2015	Fungsi Lain <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring Mutu Hasil Perikanan dan Residu Perairan • Sertifikasi Penerbitan HC Mutu Ekspor dan Pengendalian Impor • Pengelolaan Laboratorium Pengujian

IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Cara pengukuran untuk pencapaian IK

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

- A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB
- B = Persentase Unit menerapkan CPIB
- C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
- D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB
- E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB
- F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal
- xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*

Untuk organisasi Stasiun KIPM Yogyakarta sampai dengan triwulan III tahun 2025 ada realisasi untuk sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik, Cara Pembenihan Ikan Yang Baik dan Cara Penanganan Ikan Yang Baik di Atas Kapal. Untuk sertifikasi bidang primer lainnya sampai dengan triwulan III 2025 tidak ada permohonan. Sehingga capaian pada indikator 01 sampai dengan triwulan III adalah sebagai berikut

- **CBIB : Cara Budidaya Ikan Yang Baik**
Target Sertifikat : 28
Realisasi Sertifikat : 21
Persentase Capaian : 75
- **CPIB : Cara Pembenihan Ikan Yang Baik**
Target Sertifikat : 9
Realisasi Sertifikat : 8
Persentase Capaian : 88,9
- **CPPIB : Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik**

Target Sertifikat : 0

Realisasi Sertifikat : 0

Persentase Capaian : -

- **CPOIB : Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik**

Target Sertifikat : 0

Realisasi Sertifikat : 0

Persentase Capaian : -

- **CDOIB : Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik**

Target Sertifikat : 0

Realisasi Sertifikat : 0

Persentase Capaian : -

- **CPIB Kapal : Cara Penanganan Ikan Yang Baik di atas Kapal**

Target Sertifikat : 85

Realisasi Sertifikat : 70

Persentase Capaian : 82,4

Sehingga secara total realisasi Indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) adalah sebagai berikut

$$\%X = (75 + 88,9 + 0 + 0 + 0 + 82,4) / 3 = 82,1\%$$

Capaian indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sampai dengan triwulan III tahun 2025 ialah 82,1% dari target 70% sehingga pencapaian kinerja ialah 117,29%, hal ini sama jika dibandingkan dengan renstra 2025-2029 yang targetnya 70%. Sementara realisasi tahun sebelumnya yaitu 100%.

Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik diatas Kapal adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan penangkapan ikan. Realisasi CPIB Kapal semuanya merupakan kapal pembeku yang melakukan pembongkaran di PPS Cilacap. Untuk wilayah DIY sendiri belum ada permohonan pengajuan SCPIB Kapal dengan kendala. Pelaksanaan inspeksi kapal pada tahun 2025 ini dominan dilakukan secara virtual. Kendala dalam proses sertifikasi CPIB Kapal ialah waktu pendaratan dan kegiatan bongkar kapal yang tidak menentu dan sering mendadak dan permohonan sering diajukan mendadak, sehingga sulit untuk merencanakan kegiatan inspeksi CPIB Kapal dan pelaksanaan inspeksi tidak bisa berjalan optimal. Untuk megantisipasi hal tersebut, pemilik kapal dapat mengajukan terlebih dahulu

permohonan kapal yang diperkirakan akan sandar dalam waktu dekat sehingga UPT bisa memperkirakan petugas inspektur mutu yang akan bertugas.

Indikator kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai target. Keberhasilan capaian merupakan hasil koordinasi yang baik antara Pimpinan dengan pegawai dibawahnya. Kepatuhan pengguna jasa dalam melengkapi dokumen permohonan juga menjadi aspek dalam pencapaian target.



Gambar 6. Kegiatan Sertikasi CPIB Kapal secara remote

Untuk sertifikasi primer lainnya pada pelaksanaan pelayanan sertifikasi CBIB dan CPIB lingkup BPPMHKP Yogyakarta dilakukan secara *online* maupun *offline*.



Gambar 7. Kegiatan inspeksi CBIB dan CPIB Budidaya secara *online* dan *offline*

Disamping melakukan inspeksi CBIB dan CPIB BPPMHKP Yogyakarta bergerak melakukan sosialisasi sebagai narasumber bertempat di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 29 Juli 2025. Materi yang disampaikan mencakup standar teknis dan prosedur sertifikasi yang harus dipenuhi pelaku usaha guna memperoleh sertifikat CBIB dan CPIB, sebagai prasyarat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.



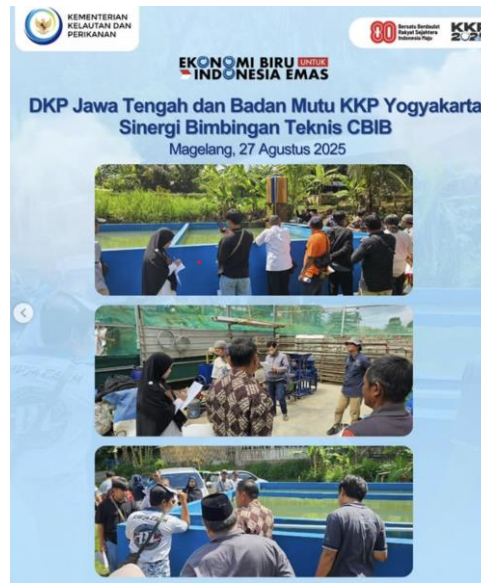
Gambar 8. BPPMHKP Yogyakarta mewakili sebagai narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi CBIB dan CPIB

Selanjutnya melakukan sosialisai Sertifikat CBIB dan CPIB BPPMHKP Yogyakarta juga ikut mendukung program kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Yogyakarta sebagai narasumber dalam upaya sosialisasi perizinan perikanan budidaya masyarakat di Yogyakarta. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh masyarakat setempat serta antusias dalam penyamapain materi yang diberikan. Harapan dilakukan sosialisasi tersebut agar pembudidaya semakin mudah dalam mengakses layanan perizinan sehingga usaha budidaya dapat berkembang lebih maju, berdaya saing dan sesuai ketentuan pada regulasi yang mengatur.



Gambar 9. BPPMHKP Yogyakarta sebagai narasumber kegiatan sosialisasi perizinan perikanan budidaya

Kegiatan dalam upaya mewujudkan sektor perikanan yang berkualitas unggul yang berkelanjutan dan berdaya saing global, BPPMHKP Yogyakarta bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah bersinergi bersama melakukan bimbingan Teknis CBIB yang diselenggarakan pada 27 Agustus 2025 di Magelang. Penyampain materi teknis-teknis yang menghasilkan budidaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menghasilkan perikanan yang berdaya saing serta terjun langsung dalam melakukan evaluasi keberlanjutan.



Gambar 10. BPPMHKP Yogyakarta dan DKP Jawa Tengah dalam kegiatan sinergi Bimbingan Teknis CBIB

REKAPITULASI PELAKSANAAN CBIB

Nama UPT : Stasiun KIPM Yogyakarta
Tahun : 2025

No. Unit	Nama Unit Pembenihan	Komoditas	Lokasi	Pemilik / MPM/Penangung jawab	No. Telepon	Tanggal Permohonan	Status Permohonan	No SP/Tgl SP Pusat	No SP/Tgl SP UPT	Tanggal Inspeksi	Petugas Inspeksi			Tanggal Rapat Teknis	Tingkat Kelulusan	Tanggal sertifikat	No Sertifikat	Masa Berlaku Sertifikat
1	UK BAP Congot	Ikan Nila	Pasir Mendit, Desa Jangkaran, kec. Temon, Kab Kulon progo, DIY	Bimastya Lazuardi, S.Pi	081239937200	19 Mei 2025	Baru	B.601/BPPMHPK/3/KP.440/VI/2025 / 12 Juni 2025	B.524/SKPM.JOG/K.P.440/VI/2025 / 16 Juni 2025	17 Juni 2025	Aldino	Halim	Izaak	22 Mei 2025	Sangat Baik			4 Tahun
2	Catur Igo Prasetyo	Nila	DUSUN CITENGAH RT002 RW001, Desa/Kelurahan Tegalsari, Kec. Sidareja, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	Catur Igo Prasetyo		25 Juni 2025	Baru			9 Juli 2025	Maria	Meltri		11 Juli 2025	Cukup	18 Juli 2025	ID-CBIB-T-34-250137	4 Tahun
3	Hoeruman	Lele	DUSUN RAWASARI, Desa/Kelurahan Rawajaya, Kec. Bantarsari, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	Hoeruman		25 Juni 2025	Baru			9 Juli 2025	Maria	Meltri		14 Juli 2025	Cukup	18 Juli 2025	ID-CBIB-T-34-250136	4 Tahun
4	Junaedi	Lele	DUSUN BINANGUN, Desa/Kelurahan Tayem, Kec. Karangpucung, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	Junaedi		25 Juni 2025	Baru			9 Juli 2025	Aldino	Cholis		11 Juli 2025	Cukup	18 Juli 2025	ID-CBIB-T-34-250138	4 Tahun
5	Darmo	Nila Merah	DUSUN BINANGUN, Desa/Kelurahan Tayem, Kec. Karangpucung, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	Darmo		25 Juni 2025	Baru			9 Juli 2025	Aldino	Cholis		11 Juli 2025	Cukup	18 Juli 2025	ID-CBIB-T-34-250135	4 Tahun
6	Rasikam	Lele	DUSUN LIUNGGUNUNG, Desa/Kelurahan Ciruyung, Kec. Karangpucung, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	Rasikam		25 Juni 2025	Baru			10 Juli 2025	Aldino	Cholis		11 Juli 2025	Cukup	18 Juli 2025	ID-CBIB-T-34-250133	4 Tahun
7	Sunamiarja	Lele	DUSUN CUOHO, Desa/Kelurahan Tayem, Kec. Karangpucung, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	Sunamiarja		25 Juni 2025	Baru			10 Juli 2025	Aldino	Cholis		11 Juli 2025	Cukup	18 Juli 2025	ID-CBIB-T-34-250134	4 Tahun
8	Sri Rahayu	Nila Merah	DUSUN CUOHO, Desa/Kelurahan Tayem, Kec. Karangpucung, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	Sri Rahayu		25 Juni 2025	Baru			10 Juli 2025	Aldino	Cholis		11 Juli 2025	Baik	18 Juli 2025	ID-CBIB-T-34-250132	4 Tahun
9	Sunyoto	Lele	DUSUN BINANGUN, Desa/Kelurahan Tayem, Kec. Karangpucung, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	Sunyoto		25 Juni 2025	Baru			9 Juli 2025	Aldino	Cholis		11 Juli 2025	Cukup	18 Juli 2025	ID-CBIB-T-34-250131	4 Tahun
10	Malik lele/Imam Malik Subchan	Lele	TAYEM, Desa/Kelurahan Tayem, Kec. Karangpucung, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	Imam Malik Subchan		25 Juni 2025	Baru			9 Juli 2025	Aldino	Cholis		11 Juli 2025	Baik	18 Juli 2025	ID-CBIB-T-34-250139	4 Tahun
11	DARUS LELE WIDARAPAYUNG WETAN	Lele	JL.DIPONEGORO RT 003/001, Desa/Kelurahan Widarapayung Wetan, Kec. Binangun, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	DARUS		25 Juni 2025	Baru			10 Juli 2025	Maria	Meltri		14 Juli 2025	Cukup	18 Juli 2025	ID-CBIB-T-34-250130	4 Tahun
12	Sumanto	Udang Vannamei	Jl Ranumiharjo, Desa/Kelurahan Babakan, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap	Sumanto		25 Juni 2025	Baru			31 Juli 2025	Halim	Inayah		04 Agust 2025	Sangat Baik	14 Agustus 2025	ID-CBIB-P-34-250248	4 Tahun
13	PT. Perikanan Nusantara Siwalima	Sidat	Jl. Trantana RT/RW 002/004 Desa/Kelurahan Kaliwungu, Kec.Kedungreja, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	Eka Tani Putra		05 Agust 2025	Baru			21 Agust 2025	Aldino	Siti	Rizka		Cukup	26 Agustus 2025	ID-CBIB-T-34-250276	4 Tahun
14	Trubus Raharjo Mulyono	Nila	Brongkol RT001/RW017 Desa/Kelurahan Argomulyo, Kec. Cangkringan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Trubus Raharjo Mulyono		05 Agust 2025	Baru			21 Agust 2025	Aldino	Siti	Rizka		Cukup	11 Sept 2025	ID-CBIB-T-34-250328	4 Tahun
15	Arif Rohman Wijnarko	Nila	Brongkol Desa/Kelurahan Argomulyo, Kec. Cangkringan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Arif Rohman Wijnarko		05 Agust 2025	Baru			21 Agust 2025	Aldino	Siti	Rizka		Cukup	11 Sept 2025	ID-CBIB-T-34-250330	4 Tahun
16	Nurfatah	Nila	Brongkol RT003/RW018 Desa/Kelurahan Argomulyo, Kec. Cangkringan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Nurfatah		05 Agust 2025	Baru			21 Agust 2025	Aldino	Siti	Rizka		Cukup	11 Sept 2025	ID-CBIB-T-34-250327	4 Tahun
17	Walidi	Nila	Brongkol RT002/RW017 Desa/Kelurahan Argomulyo, Kec. Cangkringan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Walidi		05 Agust 2025	Baru			21 Agust 2025	Aldino	Siti	Rizka		Cukup	11 Sept 2025	ID-CBIB-T-34-250329	4 Tahun
18	Kunfayakun	Lele	Dusun Kisik I RT005/RW037 Desa/Kelurahan Sendangagung, Kec.Minggir, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Kunfayakun		05 Agust 2025	Baru			21 Agust 2025	Aldino	Siti	Rizka		Baik	15 Sept 2025	ID-CBIB-T-34-250337	4 Tahun
19	Albertus Budi S	Patin dan Lele	Jl. Palagan tentara pelajar km. 12, Donolayan RT.03, RW.22, Donoharjo,Kec. Ng	Albertus Budi S		05 Agust 2025	Baru			21 Agust 2025	Aldino	Siti	Rizka		Baik	17 Sept 2025	ID-CBIB-T-34- 250349	4 Tahun
20	Adi Cahyono	Lele	BOLU RT 03 RW 16 Desa/Kelurahan Margokatton, Kec. Seyegan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Adi Cahyono		05 Agust 2025	Baru			21 Agust 2025	Aldino	Siti	Rizka		Sangat Baik	19 Sept 2025	ID-CBIB-T-34- 250356	4 Tahun
21	Wibowo Soemanto	Nila	Dusun Jaban RT005/RW037 Desa/Kelurahan Sendangrejo, Kec. Minggir, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Wibowo Soemanto		05 Agust 2025	Baru			21 Agust 2025	Aldino	Siti	Rizka		Baik	19 Sept 2025	ID-CBIB-T-34- 250359	4 Tahun

IK2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Cara Pengukuran IK 02 ini adalah

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

- %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

- A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
- B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP
- xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Untuk organisasi Stasiun KIPM Yogyakarta selama triwulan III tahun 2025 terdapat realisasi untuk sertifikasi HACPP dan SKP. Sehingga capaian pada indikator 02 adalah sebagai berikut :

- **HACCP**
Permohonan Sertifikat : 22
Realisasi Sertifikat : 22
Persentase Capaian : 100
- **SKP**
Rekomendasi Sertifikat : 49
Realisasi Sertifikat : 49
Persentase Capaian : 100

Sehingga secara total realisasi Indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) adalah sebagai berikut

$$\%X = (100 + 100)/2 = 100\%$$

Capaian indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan triwulan III tahun 2025 ialah 100% dari target 70% sehingga pencapaian kinerja ialah 120%, hal ini sama jika dibandingkan dengan renstra 2020-2024 yang targetnya 70%. Sementara realisasi tahun sebelumnya yaitu 86,36%.

Sertifikasi HACCP selama triwulan III tahun 2025 dilakukan untuk satu permohonan baru ruang lingkup udang beku milik PT. Makan Udangnya Indonesia yang berlokasi di Jl. Ringroad Selatan, Glugo, Desa. Panggunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul Yogyakarta pada 11 September 2025. Selanjutnya ada penambahan 13 permohonan penambahan ruang lingkup produk dan 7 permohonan perpanjangan sertifikat HACCP. Selain tuna kaleng, produk ber HACCP lain didominasi oleh layur beku, udang beku, keong beku dan cephalopoda yang UPInya berlokasi di Cilacap.

Pelaksanaan kegiatan SKP realisasi sertifikat sampai dengan triwulan III sebanyak 49 sertifikat dari 49 rekomendasi yang terbit. Untuk penerbitan SKP terdapat persyaratan adanya rekomendasi kelayakan pengolahan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan setempat dengan presentasi 100 persen terpenuhi. Untuk SKP dan HACCP ini merupakan satu rangkaian sertifikasi, dimana SKP menjadi persyaratan dalam pengajuan HACCP. Proses sertifikasi HACCP saat ini dominan dilakukan secara remote dikarenakan lokasi UPI yang relatif jauh, sementara untuk SKP masih ada beberapa lokasi yang dapat dilakukan secara onsite. Harapannya untuk kedepannya pelaksanaan inspeksi SKP dan HACCP dalam dilakukan secara bersamaan sehingga lebih efektif waktu dan biaya. Saat ini sedang diupayakan percepatan sertifikasi HACCP bagi UMKM perikanan yang ada di DIY, sehingga dapat membuka peluang UMKM melakukan ekspor produknya.

Sertifikat Kelayakan Pengolahan adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang telah menerapkan cara penanganan dan/atau pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi. Beberapa UPI tidak terbit SKP dikarenakan tidak melakukan tindakan perbaikan kembali atas catatan yang diberikan verifikator.



Tabel 6. Realisasi HACCP Ttiwulan III Tahun 2025

No	Nama	Alamat	Provinsi	UPT	Produk	Grade		No.Sertifikat HACCP	Tgl.Terbit	Berlaku Sampai	Keterangan
1	PT. Tarzan Seafood Internasional	Kawasan PPSC Jl. Lingkar Timur, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Central Java - Indonesia	Jawa Tengah	Stasiun KIPM Yogyakarta	Frozen Sea Snail	B	1	216/PM/HACCP/PB/02/25	19 Februari 2025	19 Februari 2027	INSPEKSI PENAMBAHAN RL HACCP 17 FEBRUARI 2025
					Frozen Cooked Snail	B	2	186/PM/HACCP/PB/07/25	22 Juli 2025	22 Juli 2027	INSPEKSI PENAMBAHAN RL HACCP 16 JULI 2025
2	CV Buana Citra Sentosa	Jalan Kenanga No. 254 A, Tilukan, Sambilegi Kidul, Maguwoharjo, Depok, Sleman	Yogyakarta	Stasiun KIPM Yogyakarta	Canned Tuna	B	3	236/PM/HACCP/PL/02/25	21 Februari 2025	21 Februari 2027	INSPEKSI BARU HACCP 18 FEBRUARI 2025
3	PT Berkah Mutiara Selatan	Jl. Lingkar Timur Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, Central Java - Indonesia	Jawa Tengah	Stasiun KIPM Yogyakarta	Frozen Cooked Shellfish	C	4	007/PM/HACCP/PB/05/25	02 Mei 2025	02 Mei 2027	INSPEKSI PENAMBAHAN RL HACCP 28 April 2025
					Frozen Cooked Snail	C	5	008/PM/HACCP/PB/05/25	02 Mei 2025	02 Mei 2027	INSPEKSI PENAMBAHAN RL HACCP 28 April 2025
					Frozen Shrimp	B	6	009/PM/HACCP/PB/05/25	02 Mei 2025	02 Mei 2027	INSPEKSI PENAMBAHAN RL HACCP 29 April 2025
					Frozen Shellfish	B	7	157/PM/HACCP/PB/06/25	20 Juni 2025	20 Juni 2027	INSPEKSI PENAMBAHAN RL HACCP 16 Juni 2025
					Frozen Snail	B	8	158/PM/HACCP/PB/06/25	20 Juni 2025	20 Juni 2027	INSPEKSI PENAMBAHAN RL HACCP 16 Juni 2025
					Frozen Hairtail Fish	B	9	056/PM/HACCP/PB/09/25	03 September 2025	03 September 2027	INSPEKSI PERPANJANGAN HACCP 1 September 2025
					Salted Jellyfish	B	10	057/PM/HACCP/PB/09/25	03 September 2025	03 September 2027	INSPEKSI PERPANJANGAN HACCP 1 September 2025
5	PT Berkah Mutiara Selatan	Jl. Singa Laut No. 156 Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, Central Java - Indonesia	Jawa Tengah	Stasiun KIPM Yogyakarta	Frozen Cephalopods	B	11	029/PM/HACCP/PB/05/25	05 Mei 2025	05 Mei 2027	INSPEKSI PENAMBAHAN RL HACCP 30 April 2025
					Frozen Demersal Fish	B	12	030/PM/HACCP/PB/05/25	05 Mei 2025	05 Mei 2027	INSPEKSI PENAMBAHAN RL HACCP 30 April 2025



No	Nama	Alamat	Provinsi	UPT	Produk	Grade		No.Sertifikat HACCP	Tgl.Terbit	Berlaku Sampai	Keterangan
					Frozen Pelagic Fish	B	13	031/PM/HACCP/PB/05/25	05 Mei 2025	05 Mei 2027	INSPEKSI PENAMBAHAN RL HACCP 30 April 2025
6	PT. Toxindo Prima	Jl. Lingkar Timur No. 5, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Central Java - Indonesia	Jawa Tengah	Stasiun KIPM Yogyakarta	Frozen Cooked Lobster	A	14	132/PM/HACCP/PB/06/25	18 Juni 2025	18 Juni 2027	INSPEKSI PERPANJANGAN HACCP 12 Juni 2025
					Frozen Demersal Fish	A	15	133/PM/HACCP/PB/06/25	18 Juni 2025	18 Juni 2027	INSPEKSI PERPANJANGAN HACCP 12 Juni 2025
					Frozen Lobster	A	16	134/PM/HACCP/PB/06/25	18 Juni 2025	18 Juni 2027	INSPEKSI PERPANJANGAN HACCP 12 Juni 2025
					Frozen Shrimp	A	17	135/PM/HACCP/PB/06/25	18 Juni 2025	18 Juni 2027	INSPEKSI PERPANJANGAN HACCP 12 Juni 2025
7	PT Hasil Melimpah Cilacap	Jl. Kayak - Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap, Central Java - Indonesia	Jawa Tengah	Stasiun KIPM Yogyakarta	Frozen Cephalopods	B	18	113/PM/HACCP/PB/08/25	18 Agustus 2025	18 Agustus 2027	INSPEKSI PENAMBAHAN RL HACCP 13 Agustus 2025
					Frozen Pelagic Fish	B	19	114/PM/HACCP/PB/08/25	18 Agustus 2025	18 Agustus 2027	INSPEKSI PENAMBAHAN RL HACCP 13 Agustus 2025
					Frozen Tuna	B	20	115/PM/HACCP/PB/08/25	18 Agustus 2025	18 Agustus 2027	INSPEKSI PENAMBAHAN RL HACCP 13 Agustus 2025
8	Karya Produksi Kamto, CV	Jl. Dayakan No.29 A, Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan, Kabupaten Sleman, Special Region of Yogyakarta - Indonesia	Yogyakarta	Stasiun KIPM Yogyakarta	Frozen Pempek	A	21	307/PM/HACCP/PB/07/25	31 Juli 2025	31 Juli 2027	INSPEKSI PERPANJANGAN HACCP 12 Juni 2025
9	MAKAN UDANGNYA INDONESIA, PT	Jalan Ringroad Selatan, Glugo / Dukuh Glugo RT 06, Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Special Region of Yogyakarta - Indonesia	Yogyakarta	Stasiun KIPM Yogyakarta	Frozen Shrimp	B	22	224/PM/HACCP/PB/09/25	18 September 2025	18 September 2025	INSPEKSI BARU HACCP 11 SEPTEMBER 2025

Tabel 7. Realisasi SKP Triwulan III Tahun 2025

NO	NAMA UPI	JENIS PERMOHONAN	NOMOR SKP	TGL TERBIT	TGL KADALUARSA	NAMA PRODUK	JENIS OLAHAN	NAMA PROVINSI	NAMA KAB/KOTA
1	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36333/33/SKP/BK/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Kerang Rebus Beku	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
2	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36332/33/SKP/BK/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Keong Rebus Beku	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
3	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36334/33/SKP/KR/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Cephalopoda Kering (Sotong, Cumi Karet)	Kering	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
4	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36338/33/SKP/BK/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Ikan Pelagis Beku (Teri, Baby Tuna, Lemu)	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
5	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36337/33/SKP/BK/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Ikan Demersal Beku (Swanggi, Bawal Hita)	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
6	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36339/33/SKP/BK/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Cephalopoda Beku (Sotong, Cumi Karet)	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
7	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36340/33/SKP/BK/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Udang Beku	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
8	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36341/33/SKP/BK/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Lobster Beku	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
9	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36342/33/SKP/BK/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Kerang Rebus Beku	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
10	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36343/33/SKP/KR/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Cephalopoda Kering (Sotong, Cumi Karet)	Kering	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
11	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36335/33/SKP/BK/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Kerang Beku	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
12	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36336/33/SKP/BK/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Keong Beku	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
13	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36344/33/SKP/BK/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Kerang Beku	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
14	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36345/33/SKP/BK/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Keong Beku	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
15	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36346/33/SKP/BK/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Keong Rebus Beku	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
16	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36330/33/SKP/BK/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Lobster Beku	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
17	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36331/33/SKP/BK/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Udang Beku	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
18	PT. SINAR MAKMUR SEMARANG	perpanjangan	36235/33/SKP/LN/III/2025	3/19/2025	3/19/2027	Osein	-	Jawa Tengah	Kabupaten Magelang
19	POKLAHSAR RUMAH BELAJAR USAHA POK T	baru	36221/34/SKP/LN/III/2025	3/18/2025	3/18/2027	Keripik Ikan & Keripik Rumput Laut	Lainnya	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Gunung Kidul
20	LAGUNA INDAH	baru	35954/34/SKP/KR/III/2025	3/6/2025	3/6/2027	Krispi Ikan	Kering	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Kulon Progo
21	MINA ABADHI FARM	perpanjangan	35418/34/SKP/KR/II/2025	2/4/2025	2/4/2027	Krispi Ikan	Kering	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Bantul
22	MINA ABADHI FARM	perpanjangan	35417/34/SKP/LN/II/2025	2/4/2025	2/4/2027	Abon Ikan	Lainnya	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Bantul
23	PT. TARZAN SEAFOOD INTERNASIONAL	baru	35407/33/SKP/BK/II/2025	2/4/2025	2/4/2027	Keong Laut Beku	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
24	CV. KARYA PRODUKSI KAMTO	perpanjangan	36947/34/SKP/LN/V/2025	5/15/2025	5/15/2027	Pempek Ikan	Lainnya	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Sleman
25	Poklahsar Iwakku	Baru	37761/34/SKP/LN/VII/2025	7/4/2025	7/4/2027	Abon Ikan	Lainnya	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Kulon Progo
26	Poklahsar Iwakku	Baru	37763/34/SKP/BK/VII/2025	7/4/2025	7/4/2027	Ikan Air Tawar Fillet Bumbu Marinasi Beku	Beku	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Kulon Progo
27	Poklahsar Iwakku	Baru	37764/34/SKP/KR/VII/2025	7/4/2025	7/4/2027	Sumpia Ikan	Kering	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Kulon Progo
28	Poklahsar Iwakku	Baru	37762/34/SKP/BK/VII/2025	7/4/2025	7/4/2027	Dimsum Ikan, Dimsum Udang (Lele, Udang)	Beku	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Kulon Progo
29	Sari Lele	Baru	37760/34/SKP/AS/VII/2025	7/4/2025	7/4/2027	Lele Asap	Asap	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Kulon Progo
30	Sidiq Rizal	Perpanjangan	37759/34/SKP/LN/VII/2025	7/4/2025	7/4/2027	Keripik Ikan (Belut & Wader)	Lainnya	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Kulon Progo
31	Tarzan Seafood International	Baru	37800/33/SKP/BK/VII/2025	7/8/2025	7/8/2027	Keong Rebus Beku	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
32	MARINE FOOD A28 (EDI KARYONO)	Perpanjangan	37934/33/SKP/BK/VII/2025	7/15/2025	7/15/2027	Produk Perikanan Bernilai Tambah Beku	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Kebumen

Keberhasilan pencapaian IK ini merupakan komitmen dari Pimpinan dan Inspektur Mutu untuk melakukan kegiatan inspeksi sesuai dengan waktu layanan. Kendala dalam IK ini antara lain untuk SKP, masih adanya dua kali inspeksi (oleh pembina mutu dinas dan inspektur mutu BPPMHKP) dapat menjadi keberatan bagi UPI/UMKM. Sertifikasi HACCP ini nantinya menjadi persyaratan untuk dapat melakukan ekspor. Sertifikasi HACCP sebagai jaminan proses produksi telah menerapkan standar sanitasi, higiene dan keamanan pangan sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen, keberterimaan pasar serta memperkuat daya saing produk yang dihasilkan.



Gambar 11. Kegiatan Sertifikasi HACCP di PT. Makan Udangnya Indonesia

Disamping inspeksi HACCP BPPMHKP Yogyakarta bersama Dinas Kelautan dan Perikanan DI. Yogyakarta bersama bersinergi menyelenggarakan sosialisasi dalam percepatan sertifikasi HACCP untuk UMKM Unggul. Kegiatan ini merangkul Bersama UMKM untuk meningkatkan standar produk dan memperluas pasar domestik maupun ekspor serta mewujudkan peningkatan daya saing persaingan global yang berkelanjutan dengan hasil produk yang aman, bermutu dan berdaya saing tinggi.



Gambar 12. Kegiatan sinergi UPI Ekpor Ikan

Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan. Untuk realisasi pelaksanaan HACCP terdiri dari terbitnya sertifikat baru sebanyak 22 produk, realisasi sertifikat HACCP realisasi 100%.

Indikator kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai target. Keberhasilan capaian merupakan hasil koordinasi yang baik antara Pimpinan dengan pegawai dibawahnya. Kepatuhan pengguna jasa dalam melengkapi dokumen permohonan juga menjadi aspek dalam pencapaian target. Ada beberapa catatan terkait SKP yang tidak terbit dikarenakan tidak dilakukan tindakan perbaikan oleh UPI sehingga tidak direkomendasikan untuk diterbitkan sertifikat SKP, namun ada juga yang masih dalam tahapan tindakan perbaikan sehingga sertifikat belum dapat di proses.

LK 3.Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (lokasi)

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan.

Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai Pengawasan Mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran marine biotoxin dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP.

Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini dilakukan di Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan Lokasi wilayah Perairan/Pelabuhan Perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestic yang bebas dari cemaran marine biotoxin dan cemaran kimia berbahaya.



Gambar 13. Kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik

BPPMHKP Yogyakarta melakukan pengawasn mutu hasil perikanan domestik di pasar modern dan tradisional pada kota Yogyakarta tepatnya di pasar Sentul, Pasar

Bringharjo, Superindo Parangtritis dilaksanakan pada 24 september 2025 yang sebelumnya sampel pertama telah dilakukan pada tanggal 11 maret 2025 lalu. Selanjutnya titik pengambilan sampel di Kecamatan Sleman pada pada Pasar Stan dan Pasar Condongcatur pada tanggal 24 september 2025 dan sampel pengambilan sampel pertama pada 13 maret 2025. Pengambilan sampel tersebut merupakan realisasi capaian 2025 triwulan III hingga tercapai 100%. Tujuan uji mutu perikanan berguna untuk memastikan ikan yang dipasarkan segar, bergizi, dan aman dikonsumsi masyarakat. Pemeriksaan meliputi penanganan ikan, sarana prasarana pemasaran, serta pengambilan sampel untuk uji laboratorium (organoleptik, formalin, mikrobiologi).

• **Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik**

Target Pengawasan : 2 lokasi

Realisasi Pengawasan : 2 lokasi

Persentase Capaian : 100 %

Sehingga secara rinci realisasi Indikator Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) adalah sebagai berikut

Tabel Realisasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik Triwulan III 2025

No	Kabupaten (LOKASI)	Titik Pengambilan Sampel (LOKUS)	Tanggal Pengambilan Sampel (Sem I)	Tanggal Pengambilan Sampel (Sem II)	Ket
1	Sleman	Pasar Stan	13 Maret 2025	24 September 2025	Realisasi Lokasi Triwulan I : 2 Lokasi Triwulan II : - Lokasi sd Triwulan II : 2 Lokasi Triwulan III : 2 Lokasi sd Triwulan III : 2 Lokasi Triwulan IV : - Lokasi sd Triwulan IV : - Lokasi
		Pasar Condong Catur			
2	Kota Yogyakarta	Pasar Sentul	11 Maret 2025	23 September 2025	
		Pasar Beringharjo			
		Superindo Parangtritis			

Indikator kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai target. Keberhasilan capaian merupakan hasil koordinasi yang baik antara Pimpinan dengan pegawai dibawahnya. Koordinasi yang baik pada indikator kegiatan ini ialah antara BPPMHKP Yogyakarta dengan Instnasi Daerah dikarenakan kegiatan ini merupakan kegiatan lintas sektoral yang melibatkan berbagai stakeholder. Kendala yang dihadapi adalah tindaklanjut dari temuan yang ada tidak semua dapat dilakukan perbaikan karena keterbatasan anggaran dari instansi pembina.

Capaian indikator Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta triwulan III tahun 2025 ialah 2 lokasi dari target 2 lokasi sehingga pencapaian kinerja ialah 100%, hal ini sama jika dibandingkan dengan renstra 2020-2024 yang targetnya 2.

IK 4.Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (SMKHP yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Saat ini nomenklatur HC telah menjadi SMKHP. Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) atau disebut juga Health Certificate (HC) merupakan bukti bahwa hasil perikanan yang dipasarkan telah diproses berdasarkan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterbitkan apabila suatu produk/hasil perikanan telah memenuhi persyaratan atau standar yang berlaku sehingga aman untuk dikonsumsi manusia. Dengan berkembangnya sistem manajemen mutu, maka penerbitan SMKHP didasarkan pada hasil pengawasan mutu terhadap efektifitas penerapan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada Unit Usaha Pembenihan, Pembesaran dan Unit Pengolahan Ikan serta hasil pengujian contoh

Cara pengukuran indikator ini ialah :

$$x = \frac{A - B}{A}$$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = SMKHP yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah SMKHP yang ditolak oleh negara tujuan



Gambar 14. Proses Bisnis Kegiatan Ekspor Hasil Kelautan dan Perikanan

SMKHP sendiri adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Otoritas Kompeten Jaminan Mutu hasil perikanan dalam hal ini Badan Mutu KKPmenerangkan bahwa ikan atau hasil perikanan yang tertuang dalam dokumen sertifikat tersebut telah dinyatakan memenuhi standar mutu dan keamanan. Melalui proses penjaminan mutu di hulu (produksi), distribusi hingga hilir. Sertifikat ini sebagai dokumen yang dipersyaratkan untuk hasil perikanan konsumsi dan non konsumsi yang dikeluarkan (Ekspor) dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kontribusi BPPMHKP dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi rasio ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor.

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan dibuktikan dengan diterimanya atau tidaknya penolakan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) UPT Stasiun KIPM Yogyakarta di negara tujuan ekspor untuk menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi dan dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tersebut. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor dihitung dengan membandingkan realisasi jumlah sertifikat yang diterbitkan dengan sertifikat yang memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (produk diterima) dikalikan 100%, seperti yang tertera pada tabel berikut :

Nama Trader	Frekuensi	Jumlah (Kg)	Nilai (Rp)
PT HASIL MELIMPAH CILACAP	54	1433683.40	46835273759.00
PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	28	632200.00	15394263703.00
PT. TARZAN SEAFOOD INTERNASIONA	12	298129.00	5983610918.00
PT.TOXINDO PRIMA	32	384169.30	61361301559.56
Grand Total	126	2748181.70	129574449939.56

Negara	Frekuensi	Jumlah (Kg)	Nilai (Rp)
China	93	2351436.40	67462056840.80
Japan	32	384169.30	61361301559.56
Korea (South)	1	12576.00	751091539.20
Grand Total	126	2748181.70	129574449939.56

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, SMKHP yang memenuhi syarat sejumlah 126 sertifikat tanpa ada kasus penolakan ekspor. Dengan demikian rasio ekspor ikan yang diterima di negara tujuan pada Triwulan ini mencapai 100% dari target 99% sehingga secara persentase kinerja tercapai 101,01%

Sehingga secara total realisasi Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) adalah sebagai berikut

$$\%x = \frac{126 - 0}{126} = 100\%$$

Negara tujuan ekspor utama melalui BPPMHKP Yogyakarta yaitu negara jepang dengan dan china. Komoditas yang di ekspor berupa udang beku, keong beku, cumi beku. Keberhasilan ini didukung oleh kinerja penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilakukan BPPMHKP Yogyakarta, melalui surveilan konsistensi penerapan HACCP melalui in-process inspection di Unit Pengolahan Ikan. Di samping itu, keberhasilan ini juga didukung oleh kinerja laboratorium BPPMHKP dalam melakukan pengujian virus, kimia, mikrobiologi dan organoleptik dan peningkatan kompetensi inspektur mutu yang ada di UPT BPPMHKP Yogyakarta.

Keberhasilan kegiatan ini merupakan bentuk kepatuhan dari pengguna jasa dalam memenuhi persyaratan ekspor. Petugas Inspektur mutu juga secara konsisten melakukan surveilen ke UPI untuk memastikan penerapapan SJMHKP terus dilakukan. Beberapa kendala dalam pelaksanaan ekspor ialah transisi dari BKIPM dan BPPMHKP sehingga pelaku usaha belum tersosialisasi sepenuhnya untuk pengurusan menggunakan aplikasi yang baru.



Gambar 15. Kegiatan Ekspor Triwulan II Melalui Stasiun KIPM Yogyakarta

Sasaran kegiatan 2.

Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Pada sasaran kegiatan 2 ini didukung oleh 2 indikator kinerja yaitu a. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta dan b. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta. Namun pada triwulan II belum ada target terlaksananya kegiatan tersebut.

Sasaran kegiatan 3.

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Pada sasaran kegiatan 3 terdapat 3 indikator kegiatan yang mendukung untuk triwulan III tahun 2025 yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta, Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta dan Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

IK12. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)

Definisi IKU ini adalah persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat

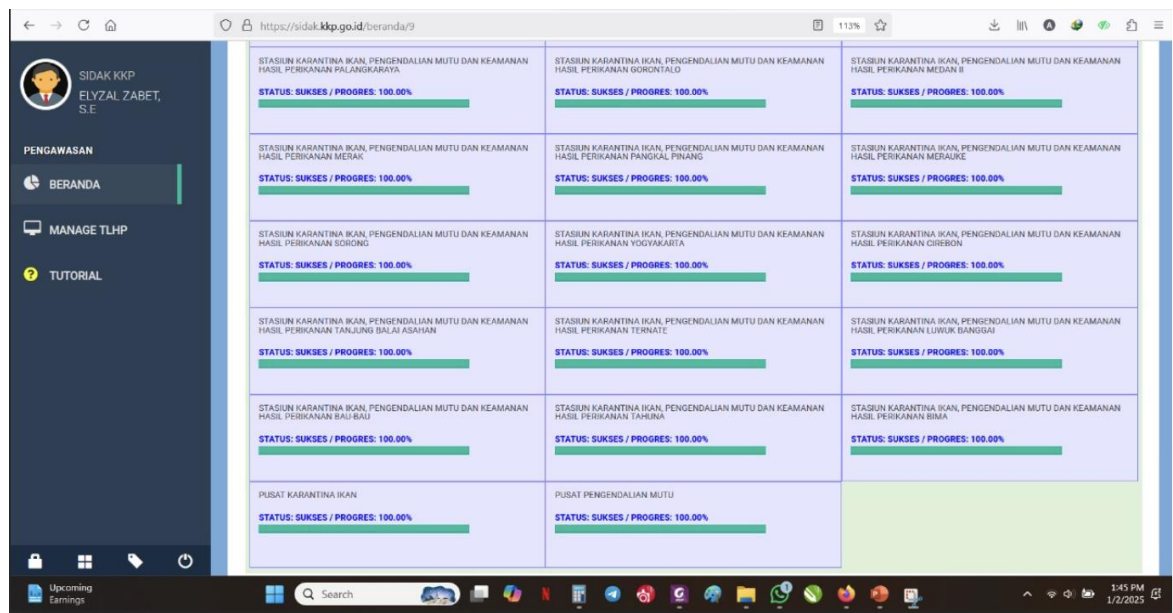
maupun Bab) yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) sampai dengan waktu pengukuran. Realisasi indikator ini pada triwulan III tahun 2025 adalah 117,65% dari target 85% atau tercapai 117,65% sebagaimana tampilan pada dashboard Aplikasi Sidak KKP sesuai Gambar 16 berikut. Sedangkan realisasi pada triwulan I tahun 2024 adalah 100% dari target 80% atau tercapai 120%.

$$\text{Rumus perhitungan} = \frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan :

$\sum Nt$: Jumlah rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti

$\sum N$: Jumlah rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP



Gambar 16. Tangkapan Layar SIDAK 2025

$\sum Nt$: Jumlah rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti = 0

$\sum N$: Jumlah rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP = 0

$$\% \text{ rekomendasi} = \frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

IKS.13. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses

pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula Perhitungan:

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP =

$$\frac{\text{Nilai rencana PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang dan Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. Pengukuran indikator dilakukan secara triwulanan dengan target 76% dan realisasi sebesar 100 % atau tercapai 120%.

$$\%RUP\ PBJ\ pada\ SiRUP = \frac{810,283.000}{810,283.000} \times 100\% = 100\%$$

IKS.15. Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Selain itu, data SKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. SKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Kep/14/M.PAN/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Oleh karena itu, Stasiun KIPM Yogyakarta telah melakukan Pengukuran Survei Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada triwulan III tahun 2025. Pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat pada triwulan III tahun 2025 dilakukan pada awal bulan Juli s/d akhir bulan September 2025 yang diisi oleh responden yang telah menerima pelayanan dari Stasiun KIPM Yogyakarta minimal 3 bulan terakhir dengan mengisi kuesioner secara online pada link :<https://ptsp.kkp.go.id/skm/>, kemudian dari data aplikasi SUSAN (Survei Kepuasan) tersebut diolah untuk menjadi sebuah bentuk Laporan Survei Kepuasan Masyarakat.

Link dibagikan kepada pengguna jasa baik dengan mengirimkan link melalui WhatsApp dalam bentuk QRcode atau link website <https://ptsp.kkp.go.id/skm/> ataupun dengan menunjukkan printout Qrcode yang tersedia di meja pelayanan jika pengguna jasa langsung datang ke kantor pelayanan Stasiun KIPM Yogyakarta. Berdasarkan hasil rekapitulasi data yang telah diisi secara online melalui aplikasi Susan (Survei Kepuasan) oleh responden pada triwulan III tahun 2025 didapatkan sebanyak 34 (tiga puluh empat) responden yang telah mengisi data dengan baik dan data ini kemudian diolah serta dianalisis lebih lanjut Realisasi Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Yogyakarta pada triwulan III tahun 2025 adalah 92,65 dari target 88 atau tercapai 105,18%. Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan, secara umum kualitas pelayanan pada Unit Pelayanan Teknis Stasiun KIPM Yogyakarta dipersepsikan Sangat Baik oleh masyarakat penggunanya. Hal ini terlihat dari nilai persepsi sebesar 92,65 (Gambar 17) berada dalam interval indeks persepsi antara 3,1 – 4,0 dengan nilai konversi interval indeks persepsinya berada antara 88,31 – 100,00.



Gambar 17. Nilai SKM Triwulan I Tahun 2025 Stasiun KIPM Yogyakarta

Pencapaian indikator ini merupakan hasil penilaian dari pengguna jasa terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPPMHKP Yogyakarta. Pelayanan yang diberikan memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi yang diharapkan oleh pengguna jasa

3.3. Realisasi Anggaran

3.3.1. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seluruh Kementerian/lembagadiminta untuk melakukan penghematan penggunaan anggaran. Stasiun KIPM Yogyakarta juga berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan efisisensi anggaran dengan memaksimalkan realisasi anggaran.

Alokasi anggaran perubahan Stasiun KIPM Yogyakarta pada tahun anggaran (T.A) 2025 triwulan III adalah Rp 4.806.654.000. Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta pada triwulan III tahun 2025 mencapai Rp. 2.725.926.036 atau sebesar 56,71%. Rekapitulasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9 Penyerapan Anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta sd Triwulan III Tahun 2025

Bulan : 01 s.d. 09

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	3987 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	PAGU	2,682,854,000	1,708,800,000	0	0	0	0	0	0	0	4,391,654,000
		REALISASI	1,835,724,655 (68.42%)	820,307,440 (48.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2,656,032,095 (60.48%)
		SISA	847,129,345	888,492,560	0	0	0	0	0	0	0	1,735,621,905
2	3989 Pengendalian Mutu	PAGU	0	250,000,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000,000
		REALISASI	0.00%	17,333,100 (6.93%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	17,333,100 (6.93%)
		SISA	0	232,666,900	0	0	0	0	0	0	0	232,666,900
3	7010 Manajemen Mutu	PAGU	0	165,000,000	0	0	0	0	0	0	0	165,000,000
		REALISASI	0.00%	52,560,841 (31.86%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	52,560,841 (31.86%)
		SISA	0	112,439,159	0	0	0	0	0	0	0	112,439,159
GRAND TOTAL		PAGU	2,682,854,000	2,123,800,000	0	0	0	0	0	0	0	4,806,654,000
		REALISASI	1,835,724,655 (68.42%)	890,201,381 (41.92%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	2,725,926,036 (56.71%)
		SISA	847,129,345	1,233,598,619	0	0	0	0	0	0	0	2,080,727,964

3.3.2 Penjelasan atas realisasi anggaran

Matrix Pendanaan di Stasiun KIPM Yogyakarta terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM, Pengendalian Mutu dan Manajemen mutu. Tiap-tiap kegiatan didukung anggaran yang digunakan untuk mencapai output yaitu :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM
 - a. Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan
 - b. Operasional Kantor dan Pemeliharaan

- c. Layanan Sarana Internal
- d. Layanan Manajemen SDM
- e. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
- f. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
- g. Layanan Manajemen Keuangan
- h. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

2. Pengendalian Mutu

- a. Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi
- b. Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)
- c. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI
- d. Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi
- e. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability
- f. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- g. Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya
- h. Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- i. Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya

3. Manajemen Mutu

- a. Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan
- b. Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan
- c. Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium
- d. Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi

3.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai tujuan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa :

- Sumber Daya Manusia yang kompeten
- Sumber Dana yang mencukupi

- Sarana dan Prasarana yang memadahi

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam anjab sebanyak 50 orang ASN baik teknis maupun administrasi	Jumlah SDM setelah adanya reorganisasi saat ini sebanyak 17 orang ASN dibantu 5 PPNPN	Masih dibutuhkan banyak SDM untuk menjalankan organisasi yang baru dengan tupoksi yang baru	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar
Kondisi anggaran yang mencukupi untuk melaksanakan kegiatan pada organisasi yan baru dan ketugasan yang baru	Saat ini SOTK UPT BPPMHKP belum disahkan sehingga anggaran belum dapat digunakan pada kegiatan tertentu	Masih membutuhkan kepastian sumber dana / anggaran yang dapat mendukung tujuan dan sasaran organisasi	Mendorong disahkannya SOTK yang baru agar anggaran dapat dicukupi dan segera dapat digunakan
Tercukupinya Sarana Prasarana Kerja untuk mendukung operasional di lapangan	Beberapa aset dilimpahkan kepada BKHIT	Masih membutuhkan baik alat, kendaraan operasional di lapangan agar menjangkau semua kegiatan	Mengajukan / usulan pengadaan baik alat maupun kendaraan operasional dan tanah

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan III Tahun 2025 menyajikan capaian sasaran strategis Stasiun KIPM Yogyakarta pada periode Triwulan III Tahun 2025 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Terhadap capaian tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulanan, tahunan dan juga target Renstra 2025-2029 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja BPPMHKP Yogyakarta Triwulan III Tahun 2025 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

- Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan II Tahun 2025 adalah 114,43%
- NPSS Stasiun KIPM Yogyakarta masuk dalam kategori istimewa.
- Seluruh capaian IKU dan IK pada periode Triwulan III Tahun 2025 telah tercapai sesuai dan melebihi target Triwulan III yang ditentukan.
- Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta pada triwulan III tahun 2025 mencapai Rp 2.725.926.036 atau sebesar 56,71% dari pagu Rp 4.806.654.000.

4.2. Rekomendasi

- Melakukan evaluasi kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta secara rutin (bulanan dan triwulanan) sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian kinerja pada periode anggaran berikutnya
- Mengoptimalkan anggaran yang tersedia, selagi menunggu proses SOTK
- Meningkatkan kompetensi atas ketugasan baru BPPMHKP sebagai otoritas kompeten SJMKHP dan 9 Sertifikasi
- Tetap melakukan pemeliharaan status akreditasi dan status WBK yang telah dimiliki